

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Tentang Kepemimpinan

2.1.1 Kepemimpinan

Kepemimpinan dalam konteks struktural tidak hanya terikat pada bidang atau sub bidang yang menjadi garapannya, tetapi juga oleh rumusan tujuan dan program pencapaiannya yang telah ditetapkan oleh pemimpin yang lebih tinggi posisinya. Setiap anggota harus melaksanakan tanpa menyimpang. Sehingga dalam hal ini kepemimpinan diartikan sebagai proses pemberian motivasi agar orang-orang yang dipimpin melakukan kegiatan atau pekerjaan sesuai dengan program yang telah ditetapkan. Kepemimpinan secara luas meliputi proses mempengaruhi dalam menentukan tujuan organisasi, memotivasi perilaku pengikut untuk mencapai tujuan, mempengaruhi untuk memperbaiki kelompok dan budayanya. Selain itu juga memengaruhi interpretasi mengenai peristiwa-peristiwa para pengikutnya, pengorganisasian dan aktivitas-aktivitas untuk mencapai sasaran, memelihara hubungan kerja sama dan kerja kelompok, perolehan dukungan dan kerja sama dari orang-orang di luar kelompok atau organisasi.

Kepemimpinan terkadang dipahami sebagai kekuatan untuk menggerakkan dan mempengaruhi orang lain. Kepemimpinan sebagai sebuah alat, sarana atau proses untuk membujuk orang agar bersedia melakukan sesuatu secara sukarela/sukacita. Ada beberapa faktor yang dapat menggerakkan orang yaitu karena ancaman, penghargaan, otoritas, dan bujukan.

Kepemimpinan juga dikatakan sebagai proses mengarahkan dan memengaruhi aktivitas-aktivitas yang ada hubungannya dengan pekerjaan para anggota kelompok. Tiga implikasi penting yang terkandung dalam hal ini yaitu : (1) kepemimpinan itu melibatkan orang lain baik itu bawahan maupun pengikut, (2) kepemimpinan melibatkan pendistribusian kekuasaan antara pemimpin dan anggota kelompok secara seimbang, karena anggota kelompok bukanlah tanpa daya, (3) adanya kemampuan untuk menggunakan bentuk kekuasaan yang berbeda untuk memengaruhi tingkah laku pengikutnya melalui berbagai cara.

Konsep kepemimpinan erat sekali hubungannya dengan kekuasaan pimpinan dalam memperoleh alat untuk memengaruhi perilaku para pengikutnya. Terdapat beberapa sumber dan bentuk kekuasaan yaitu kekuasaan paksaan, legitimasi, keahlian, penghargaan, referensi, informasi dan hubungan. Pada dasarnya kemampuan untuk memengaruhi orang atau suatu kelompok untuk mencapai tujuan tersebut ada unsur kekuasaan. Kekuasaan tak lain adalah kemampuan untuk memengaruhi orang lain untuk mau melakukan apa yang diinginkan oleh pihak lainnya. Praktik kepemimpinan berkaitan dengan memengaruhi tingkah laku dan perasaan orang lain baik secara individual maupun kelompok dalam arahan tertentu, sehingga melalui kepemimpinan merujuk pada proses untuk membantu mengarahkan dan memobilisasi orang atau ide-idenya.

Rivai (2007:4)

Kepemimpinan resmi (formal) adalah “seseorang yang ditunjuk sebagai pemimpin, atas dasar keputusan dan pengangkatan resmi untuk memangku suatu jabatan dalam struktur organisasi dengan posisinya. Pola ini terlihat pada sebagian ketentuan yang mengatur hirarki organisasi dan biasanya tergambar dalam bagan organisasi”.

Kartono (2002:153)

Kepemimpinan adalah “kemampuan untuk mempengaruhi yang konstruktif kepada orang lain untuk melakukan satu usaha kooperatif mencapai tujuan yang sudah direncanakan selanjutnya dikatakan pemimpin harus mahir melaksanakan kepemimpinannya”.

Selanjutnya pendapat Rivai (2007:5) Kepemimpinan dapat dibagi menjadi beberapa hal yaitu :

1. Tanggung jawab yaitu kesanggupan seseorang dalam menyelesaikan pekerjaan yang diserahkan kepadanya dengan sebaik-baiknya dan tepat pada waktunya serta berani memikul resiko atas keputusan yang diambilnya atau tindakan yang dilakukannya.
2. Supervisi yaitu suatu usaha menstimulir, mengkoordinir dan membimbing serta kontiniu seorang pekerja baik secara individual maupun secara kolektif, agar lebih mengerti dan lebih efektif dalam mewujudkan seluruh fungsi pekerja, sehingga dengan demikian mereka mampu dan lebih cakap berpartisipasi dalam masyarakat modern.
3. Inisiatif yaitu kemampuan untuk mengevaluasi secara mandiri untuk mengambil kendali dalam suatu situasi sebelum orang lain bertindak.

Menurut robbins (2003:314) memberikan definisi kepemimpinan sebagai kemampuan mempengaruhi suatu kelompok menuju pada pencapaian tujuan.

Adapun greenberg dan baron (2003:471) memberikan definisi kepemimpinan sebagai proses di mana satu individu memengaruhi anggota kelompok lain menuju pencapaian tujuan kelompok atau organisasional yang didefinisikan.

Kepemimpinan adalah suatu proses memengaruhi orang lain untuk memahami dan menyetujui tentang apa yang perlu dilakukan dan bagaimana melakukannya, dan proses memfasilitasi individu dan usaha kolektif untuk menyelesaikan sasaran bersama (yukl,2010:26). Dalam definisi ini termasuk usaha tidak hanya memengaruhi dan memfasilitasi pekerjaan sekarang dari kelompok atau organisasi, tetapi juga untuk memastikan bahwa dipersiapkan menghadapi tantangan masa depan. Pengaruh dapat berbentuk langsung maupun tidak langsung.

Proses memengaruhi hanya dapat menyangkut pemimpin tunggal atau banyak pemimpin.

Kepemimpinan adalah suatu proses memengaruhi pemimpin dan pengikut untuk mencapai sasaran organisasi melalui perubahan, di mana terdapat elemen *Leaders-Followers, Influence, Organizational Objectives, Change, dan People* (Achua dan Lussier, 2010:6). Dalam definisi mereka mengandung 5 elemen, yaitu *Leaders-Followers, Influence, Organizational, Objectives, Change, Dan People* dijelaskan sebagai berikut :

- a. *Leaders-Followers*, apabila seseorang tidak tertarik atau tidak ingin berkuasa, maka mungkin dia lebih tepat menjadi *follower*. Tetapi *good follower* juga menunjukkan peran kepemimpinan apabila diperlukan. *Follower follower*, bukan hanya *leader* memengaruhi *followers*, suatu proses dua arah. Mengetahui bagaimana memimpin dan mengembangkan keterampilan kepemimpinan atau *leadership skills* akan menjadi *leader* dan *follower* yang lebih baik. *Good followers* bukanlah “*yes people*” yang sekedar mengikuti pemimpin tanpa memberi masukan yang memengaruhi pemimpin.
- b. *Influence*, memengaruhi adalah merupakan proses seorang pemimpin mengomunikasikan gagasan, memperoleh penerimaan dari mereka, dan memotivasi pengikut untuk mendukung dan mengimplementasikan gagasan melalui perubahan. *Influence* adalah esensi dari kepemimpinan.
- c. *Organizational Objectives*, pemimpin yang efektif memengaruhi *follower* tidak hanya atas kepentingan mereka sendiri, tetapi juga

kepentingan organisasi melalui visi bersama. Kepemimpinan terjadi ketika *follower* dipengaruhi melakukan apa yang etis dan bermanfaat bagi organisasi dan pribadi adalah bukan bagian dari kepemimpinan. Anggota organisasi perlu berkerja bersama untuk mendapatkan hasil yang diinginkan dari *leader* maupun *follower*, masa depan yang diharapkan, atau tujuan bersama yang memotivasi mereka menuju hasil yang lebih disukai. Pemimpin menentukan arah, tetapi kelompok harus menetapkan tujuannya.

- d. *Change*, memengaruhi dan menetapkan sasaran adalah tentang perubahan. Organisasi perlu melanjutkan perubahan yang cepat dari lingkungan global. Pemimpin yang efektif menyadari perlu adanya perubahan berkelanjutan untuk memperbaiki kinerja. *Leader* dan *follower* harus terbuka untuk perubahan. Orang yang maju dalam organisasi adalah mereka yang ingin mengambil resiko dan mencoba hal baru.
- e. *People*, kepemimpinan adalah tentang memimpin orang. Sekarang, untuk menjadi efektif di hampir setiap pekerjaan harus dapat berjalan bersama dengan orang. *Leader* dan *follower* yang efektif menikmati bekerja dengan orang dan membantu mereka sukses. Keterampilan orang lebih berharga daripada keterampilan komputer. Penelitian, pengalaman dan berdasar pikiran sehat menunjukkan bahwa terdapat hubungan langsung antara keberhasilan finansial perusahaan dan

komitmennya pada praktik kepemimpinan yang memperlakukan orang sebagai aset.

Kepemimpinan adalah sebagai penggunaan kekuasaan dan pengaruh untuk mengarahkan aktivitas pengikut pada pencapaian tujuan, di mana pengarahan dapat memengaruhi interpretasi pengikut terhadap kejadian, organisasi dari aktivitas kerja mereka, komitmen mereka terhadap kejadian, utama, hubungan mereka dengan pengikut lain, dan akses mereka pada kerja sama dan dukungan dari unit kerja lain (colquitt, lepine, dan wesson, 2015:464).

Memerhatikan pendapat ahli tersebut menunjukkan bahwa tidak terdapat kesamaan pengertian atau definisi tentang kepemimpinan atau leadership. Namun unsur kepemimpinan mengandung persamaan maupun perbedaan. Tetapi adanya perbedaan unsur tidak pula berarti bahwa pendapat mereka bertentangan, justru merupakan keberagaman yang memperkaya makna. Perbedaan komponen merupakan penekanan dalam sudut pandang masing-masing. Adapun kesamaan di antara definisi tersebut adalah : (a) kepemimpinan merupakan kemampuan mempengaruhi orang lain dengan menggunakan kekuasaannya, (b) kepemimpinan adalah suatu proses interaksi antara pemimpin dan pengikut, (c) kepemimpinan terjadi pada berbagai tingkat dalam suatu organisasi, dan (d) kepemimpinan memfokus pada penyelesaian tujuan bersama.

Jadi, dari berbagai pandangan tersebut dapat dirumuskan bahwa kepemimpinan pada dasarnya adalah “kemampuan pemimpin dalam mempengaruhi, memotivasi, mendorong, memfasilitasi aktivitas segenap sumber daya manusia untuk memberikan komitmen dan kontribusi terbaiknya untuk mencapai tujuan organisasi”.

Untuk memahami dan mengembangkan kepemimpinan, kita perlu mengenal adanya mitos dalam kepemimpinan. Mitos kepemimpinan adalah merupakan keyakinan yang dianggap benar, namun belum dibuktikan kebenarannya. Hughes, Ginnett, Dan Curphy, (2009:14) mengemukakan adanya mitos sebagai berikut :

1. Kepemimpinan yang Baik Menggunakan Pikiran Sehat

Mitos ini menyatakan bahwa hanya perlu pikiran sehat untuk menjadi pemimpin yang baik. Tetapi hal tersebut juga menunjukkan bahwa hanya mereka yang memiliki pikiran sehat saja yang telah mengetahui. Tantangan untuk memahami kepemimpinan adalah mengetahui kapan pikiran sehat diterapkan dan kapan tidak. Pemimpin perlu bertindak dengan percaya diri, tetapi juga cukup rendah hati untuk mengetahui bahwa pandangan orang lain juga berguna. Pemimpin perlu mempertahankan waktu ketika waktu menjadi sulit, tetapi juga perlu memahami ketika diminta mengubah waktu dan arah baru. Apabila kepemimpinan adalah tidak lebih dari sekedar pikiran sehat, maka hanya terdapat sedikit (apabila tidak ada), masalah ditempat pekerjaan. Tetapi dapat diperhatikan bahwa terdapat lebih banyak (daripada sekedar beberapa), masalah antara pemimpin dan pengikut. Kepemimpinan yang efektif harus menjadi sesuatu yang lebih daripada sekedar pikiran sehat.

2. Pemimpin adalah Dilahirkan, bukan Dibuat

Sebagian orang yakin bahwa untuk menjadi pemimpin adalah karena keturunan. Sedangkan yang lainnya percaya bahwa pengalaman hidup membentuk individu, tidak seorang pun melahirkan pemimpin. Kedua pendapat tersebut benar dalam arti bahwa *innate factor* atau faktor bawaan maupun *formative experience* atau perkembangan pengalaman memengaruhi banyak perilaku, termasuk kepemimpinan. Sekarang pandangan tersebut dinilai salah dari kenyataan bahwa kepemimpinan tidak merupakan bawaan atau diperoleh, tetapi yang menjadi masalah adalah bagaimana faktor tersebut berinteraksi. Adalah tidak bermanfaat berpikir bahwa dunia terbentuk dari dua tipe *mutually exclusive*, saling menggantikan, antara pemimpin dan bukan pemimpin. Adalah lebih bermanfaat mengarahkan cara di mana masing-masing orang dapat membuat kebanyakan peluang kepemimpinan yang mereka hadapi.

3. Belajar Kepemimpinan Hanya dari Sekolah

Banyak orang secara skeptis bertanya apakah kepemimpinan dapat dikembangkan melalui studi formal, sebaliknya meyakini bahwa hal tersebut hanya diperoleh melalui pengalaman aktual. Tetapi adalah salah berfikir bahwa studi formal dan belajar dari pengalaman adalah *mutually exclusive* atau *antagonistik*. Kenyataan diantara keduanya bersifat komplementer. Daripada bertanya apakah kepemimpinan dikembangkan dari studi formal atau dari pengalaman hidup nyata, lebih baik bertanya studi macam apa yang akan membantu orang belajar

pelajaran-pelajaran kritis tentang kepemimpinan dari pengalaman mereka sendiri. Mendekati masalah dengan cara ini dapat mengenal peran pengalaman kritis dalam pengembangan pelatihan yang dapat memperbaiki kemampuan orang untuk melihat pelajaran kritis tentang kepemimpinan dari pengalaman. Dengan kata lain dapat mengakselerasi proses pembelajaran dari pengalaman.

2.1.2 Tipe- Tipe Kepemimpinan

Cara-cara melaksanakan kepemimpinan dalam berbagai organisasi dapat berbeda antara satu dengan yang lainnya, penerapan kepemimpinan akan sangat dipengaruhi oleh jenis pekerjaan yang dihadapinya, situasi kerja dan kondisi dari pimpinan itu sendiri, dengan adanya pengaruh ini menyebabkan timbulnya macam-macam tipe kepemimpinan.

G.R Terry dalam buku Kartini Kartono (2014:71) mengemukakan sejumlah tipe kepemimpinan menjadi 6 hal diantaranya :

1. Tipe *Otokratis*
2. Tipe *Psikologis*
3. Tipe *Sosiologis*
4. Tipe *Suportif*
5. Tipe *Laissez Faire*
6. Tipe *Kelakuan Pribadi*

Penjelasan tentang keenam tipe-tipe kepemimpinan diatas dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Tipe kepemimpinan *otokratis* ini didasarkan atas perintah-perintah, paksaan, dan tindakan-tindakan yang arbitrer (sebagai wasit). Ia melakukan pengawasan yang ketat, agar semua pekerjaan berlangsung secara efisien. Kepemimpinannya berorientasi pada struktur organisasi dan tugas-tugas. Pemimpin tersebut pada dasarnya selalu ingin berperan dan berambisi untuk merajai situasi, karena itu dia disebut otokrat keras.
2. Tipe kepemimpinan *psikologis* ini bahwa seorang pemimpin adalah memunculkan dan mengembangkan system motivasi terbaik, untuk merangsang bawahan agar mereka mau bekerja guna mencapai sasaran organisatoris maupun untuk memenuhi tujuan pribadi.
3. Tipe kepemimpinan *sosiologis* ini dianggap sebagai usaha-usaha untuk melancarkan antara relasi dalam organisasi dan sebagai usaha untuk menyelesaikan setiap organisatoris antara para pengikutnya agar tercapai kerja sama yang baik. Tipe kepemimpinan ini pemimpin menetapkan tujuan-tujuan dengan menyertakan para pengikutnya dalam mengambil keputusan terakhir.
4. Tipe kepemimpinan *suportif* ini dianggap pengikut harus berusaha sekuat mungkin, dan bekerja penuh gairah, pemimpin dalam tipe ini perlu menciptakan suatu lingkungan kerja yang menyenangkan, dan bisa membantu mempertebal keinginan setiap pengikutnya untuk melaksanakan pekerjaan sebaik mungkin, sanggup bekerja sama dengan pihak lain, mau

mengembangkan bakat dan keterampilannya, dan menyadari benar keinginan sendiri untuk maju.

5. Tipe kepemimpinan *laissez faire* ini pada intinya bukanlah seseorang pemimpin dalam pengertian yang sebenarnya semua anggota yang di pimpinnya bersikap santai dan bermoto lebih baik tidak untuk bekerja. Tipe kepemimpinan ini disebut juga kepemimpinan yang kurang bertanggung jawab.
6. Tipe *kelakuan pribadi* ini merupakan dasar kualitas pribadi atau pola kelakuan para pemimpin itu selalu berkelakuan kurang lebih sama, yang didasarkan kepada bakat dan kemampuannya, kondisi yang dihadapi, good will atau keinginan untuk memutuskan dan memecahkan permasalahan yang timbul, derajat supervisi dan ketajaman evaluasi.

Menurut Sondang P Siagian (2010:27) menggolongkan tipe-tipe kepemimpinan, diantaranya adalah :

1. Tipe *otokratik*
2. Tipe *paternalistik*
3. Tipe *kharismatik*
4. Tipe *laissez faire*
5. Tipe *demokratik*

Penjelasan tentang tipe-tipe kepemimpinan diatas diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Tipe kepemimpinan *otokratik* ditandai dengan :

- a. Kecendrungan memperlakukan para bawahansama dengan alat-alat lain dalam organisasi seperti mesin dengan demikian kurang menghargai bakat dan martabat mereka.
- b. Pengutamaan orientasi terhadap pelaksanaan dan penyelesaian tugas tanpa mengaitkan pelaksanaan tugas itu dengan kepentingan dan kebutuhan bawahan.
- c. Pengabdian peranan bawahan dalam proses pengambilan keputusan dengan cara memberitahukan kepada bawahan tersebut, bahwa ia telah mengambil keputusan tertentu dan para bawahan diharapkan dituntut untuk melaksanakan saja.

2. Tipe *personalistik* ditandai dengan :

- a. Kuatnya ikatan primodal
- b. Extended family system
- c. Kehidupan masyarakat yang komunalistik
- d. Peranan adat yang sangat kuat dalam kehidupan bermasyarakat
- e. Masih adanya di mungkinkan hubungan pribadi yang intim antara pegawai dengan anggota lainnya.

3. Tipe *kharismatik* ditandai dengan :

Tipe kepemimpinan mempunyai karakteristik yang khas yaitu daya tariknya yang sangat memikat sehingga mampu memperoleh pengikut yang jumlahnya kadang yang sangat besar, tegasnya seorang pemimpin kharismatik ini adalah seseorang yang dikagumi oleh banyak pengikut meskipun para pengikut tersebut tidak selalu dapat menjelaskan secara

kongret mengapa orang tertentu dikagumi. Para pengikut pemimpin kharismatik tidak mempersoalkan nilai-nilai yang dianut dan sikap atau perilaku serta gaya yang digunakan oleh pimpinan yang diikutinya itu, bisa saja pemimpin kharismatik menggunakan gaya otokratik maupun gaya dictatorial.

4. Tipe *laissez faire*

Dapat dikatakan bahwa persepsi seorang pemimpin yang *laissez faire* tentang peranannya sebagai seorang pemimpin berkisar pada pandangan bahwa pada umumnya organisasi akan berjalan lancar dengan sendirinya karena para anggota organisasi terdiri dari orang yang sudah dewasa yang mengetahui apa yang menjadi tujuan organisasi, sasaran apa yang ingin dicapai dan tugas apa yang harus dikerjakan. Ditandai dengan adanya :

- a. Pendelegasian wewenang terjadi secara ekstensif
- b. Pengambilan keputusan diserahkan kepada para pejabat pemimpin yang lebih rendah dan kepada petugas operasional, kecuali dalam hal-hal tertentu yang nyata menuntut keterlibatan secara langsung.
- c. Status quo organisasi tidak terganggu
- d. Penumbuhan dan pengembangan kemampuan berfikir dan bertindak yang inovatif dan kreatif diserahkan kepada para anggota organisasi yang bersangkutan.

5. Tipe demokratik

- a. Ditandai dengan adanya tinjauan dari segi persepsi tentang kehadiran atau keberadaan dan peranannya selaku pemimpin dalam kehidupan organisasi.
- b. Timbulnya pendekatan yang holistic dan integralistik yang artinya pemimpin menyadari bahwa organisasi harus disusun sedemikian rupa dengan adanya pencapaian tugas dengan hasil tercapainya tujuan dan berbagai sasaran organisasi.
- c. Para bawahan dilibatkan secara aktif dalam menentukan nasib sendiri melalui peran sertanya dalam proses pengambilan keputusan.
- d. Selalu berusaha mengutamakan kerjasama dan team work dalam usaha mencapai tujuan.
- e. Selalu berusaha untuk menjadikan bawahannya lebih sukses daripada dirinya.
- f. Berusaha mengembangkan kapasitas diri pribadinya sebagai pemimpin secara implisit tergambar bahwa untuk menjadi pemimpin tipe demokratik bukanlah satu hal yang mudah untuk dicapai, akan tetapi karena pemimpin yang demikianlah yang paling ideal, alangkah baiknya jika semua berusaha menjadi seorang pemimpin yang demokratik.

2.1.3 Fungsi Kepemimpinan

Dalam buku Hamdan Dimayati (2014:42) Hadari Nawawi memberikan pendapat mengenai fungsi kepemimpinan yang dibedakan menjadi lima hal diantaranya :

1. *Instruktif*
2. *Konsultatif*
3. *Partisipasi*
4. *Delegasi*
5. *Pengendalian*

Penjelas dari kelima fungsi kepemimpinan diatas, uraiannya dapat penulis paparkan sebagai berikut :

1. *Instruktif* yang artinya pemimpin berfungsi sebagai komunikator yang menentukan (apa) isi perintah, (bagaimana) cara mengerjakan perintah, (bilamana) waktu memulai, melaksanakan, melaporkan hasilnya, (dimana) tempat mengerjakan perintah, agar keputusan dapat diwujudkan secara efektif, fungsi yang ada hanyalah melaksanakan perintah.
2. *Konsultatif* artinya dapat menggunakan fungsi konsultatif sebagai komunikasi dua arah, hal tersebut digunakan manakala pemimpin dalam usaha menetapkan keputusan yang memerlukan bahan pertimbangan dan konsultasi dengan orang yang ada disekitar.
3. *Partisipasi* artinya pemimpin berusaha mengaktifkan orang-orang yang dipimpinnya, baik dalam pengambilan keputusan maupun dalam melaksanakannya.

4. *Delegasi* artinya pemimpin memberikan pelimpahan wewenang dalam membuat atau menetapkan keputusan, fungsi delegasi sebenarnya adalah kepercayaan pemimpin kepada orang yang diberi kepercayaan untuk pelimpahan wewenang dengan melaksanakan secara bertanggungjawab.
5. *Pengendalian* artinya mengendalikan kepemimpinan yang efektif harus mampu mengatur aktivitas anggota secara terarah dan dalam kondisi yang efektif sehingga memungkinkan tercapainya tujuan bersama secara maksimal.

2.2 Tinjauan Tentang Pembangunan, Pembangunan Desa Dan Pembangunan Infrastruktrur

2.2.1 Pengertian Pembangunan

Pembangunan merupakan segala upaya yang terus – menerus ditunjukan untuk memperbaiki kehidupan masyarakat dan bangsa yang belum baik, atau untuk memperbaiki kehidupan yang sudah baik.

Menurut Raharjo, (dalam 1980:1) istilah “Pembangunan” yang bisa digunakan dalam bahasa indonesia, dewasa ini telah semakin berkembang sebagai terjemahan dari beragam istilah asing, sehingga terkadang mengandung keracunan pengertian. Pembangunan, dalam kehidupan sehari – hari, dapat digunakan sebagai terjemahan atau pendanaan istilah : *development, growth and change, modernization*, atau bahkan juga *progress*.

Mengenai definisi tentang istilah pembangunan itu sendiri, Riyadi (dalam Theresia Aprillia, et al, 2014:2) mengungkapkan adanya beragam rumusan yang dikemukakan oleh banyak pihak, namun kesemuanya itu mengarah kepada suatu kesepakatan bahwa :

Pembangunan adalah suatu usaha atau proses perubahan, demi tercapainya tingkat kesejahteraan atau mutu-hidup suatu masyarakat (dan individu – individu di dalamnya) yang berkehendak dan melaksanakan pembangunan itu.

Oleh sebab itu istilah pembangunan, terkandung begitu banyak pokok-pokok pikiran, yang antara lain adalah sebagai berikut:

- a) pembangunan adalah suatu proses atau rangkaian kegiatan yang tidak pernah kenal berhenti, untuk terus menerus mewujudkan perubahan – perubahan dalam kehidupan masyarakat dalam rangka mencapai perbaikan mutu hidup, dalam situasi lingkungan kehidupan yang juga terus menerus mengalami perubahan – perubahan. Meskipun demikian, di dalam praktik, perencanaan pembangunan senantiasa memiliki batas waktu yang tegas, tetapi batasan – batasan itu pada hakikatnya hanyalah merupakan tahapan – tahapan yang harus dilakukan untuk menghadapi kondisi yang terjadi pada selang waktu yang juga dimaksudkan untuk terus memperbaiki mutu-hidup masyarakat (dan individu-individu di dalamnya) dalam suasana perubahan lingkungan yang akan terjadi pada selang waktu tertentu.

- b) Proses pembangunan yang terjadi, bukanlah sesuatu yang sifat alami atau “*given*”, melainkan suatu proses yang dilaksanakan dengan sadar dan terencana. Artinya, pembangunan tersebut dilaksanakan melalui sesuatu proses perencanaan terlebih dahulu, untuk menganalisis masalah-masalah atau kebutuhan-kebutuhan yang (akan) harus dipenuhi, tujuan-tujuan yang terpilih, dengan senantiasa mempertimbangkan : kekuatan, kelemahan, peluang, dan resiko yang harus dihadapi.
- c) Proses perubahan yang akan dilaksanakan dan ingin dicapai dalam setiap pembangunan, adalah perubahan yang menyeluruh yang mencakup beragam aspek dan tatanan kehidupan masyarakat yang bersangkutan. Pembangunan pada hakikatnya adalah suatu “*Eco Development*” yang tidak hanya berupa perubahan-perubahan ekonomi. Pembangunan juga mencakup “*Dehumanisasi*” kultural dan perubahan mentalitas masyarakat dalam suatu struktur sosial-politik tertentu. Dengan demikian, pembangunan bukanlah semata-mata bersifat ekonomi, melainkan mencakup banyak aspek non-materil seperti : penentuan nasib sendiri, swadaya, kemerdekaan, dan pengayoman politik, partisipasi, identitas kultural, kepribadian nasional, dsb. Berkaitan dengan itu, esensi setiap kegiatan pembangunan adalah terjadinya perubahan sikap untuk memproyeksi diri kedalam situasi lain dan karena itu secara sadar dan terencana menyiapkan diri untuk melakukan perubahan-perubahan untuk

memperbaiki mutu-hidupnya guna mengantisipasi keadaan dan perubahan-perubahan yang akan terjadi dimasa mendatang.

- d) Pembangunan, dimaksudkan untuk menghasilkan individu-individu yang senantiasa memiliki kepekaan tentang : keadaan-keadaan yang akan terjadi, masalah-masalah yang sedang dan akan terjadi, alternatif-alternatif yang mungkin dilaksanakan untuk mengatasi atau memecahkan masalah tersebut, dan dengan kemampuan sendiri (swakarsa, swadaya, swadana) mengambil keputusan untuk memilih alternatif-alternatif “*terbaik yang dapat dilaksanakan*” demi perbaikan mutu hidup masyarakat dan keluarganya.
- e) Pembangunan adalah suatu yang dilakukan : dari, oleh dan untuk masyarakat. Sehingga, pembangunan bukanlah kesiatan yang direncanakan, dilaksanakan dan dimaksudkan untuk memenuhi kepentingan segolongan atau sekelompok warga masyarakat.
- f) Pembangunan adalah pembangunan manusia seutuhnya dan pembangunan masyarakat yang bersangkutan. Artinya pembangunan harus benar- benar dimaksudkan untuk memperbaiki mutu-hidup setiap individu dan masyarakatnya, dan bukannya mengorbankan manusia (dan masyarakatnya) demi tercapainya tujuan-tujuan pembangunan.

Untuk tercapainya tujuan-tujuan pembangunan sebagaimana disebutkan diatas, kegiatan pembangunan memerlukan “teknologi-teknologi” tertentu sebelumnya telah dipilih (Margono Slamet, 1985:5), sehingga seluruh sumber daya yang tersedia dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi perbaikan mutu-hidup

masyarakat. Melalui penerapan teknologi-teknologi yang dipilih seperti itu dimaksudkan pula agar pembangunan dapat dilaksanakan terus menerus sampai waktu yang tidak terbatas. Sebaliknya, penggunaan atau penerapan teknologi tertentu, harus dijaga agar sumberdaya yang diperlukan senantiasa tersedia secara lestari, dan jangan sampai justru merusak kesinambungan tersedianya sumberdaya, yang pada gilirannya justru akan merusak atau menurunkan mutu-hidup generasi mendatang.

Jadi, pembangunan merupakan segala upaya atau suatu proses usaha dalam melaksanakan perubahan atau perbaikan ke arah yang lebih baik yang mencakup beragam aspek.

2.2.2 Pengertian Pembangunan Desa

Dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa pasal 78 ayat (1) Pembangunan desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Pembangunan desa pada hakikatnya mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial.

Desa menyusun perencanaan pembangunan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten/kota. Dokumen rencana Pembangunan Desa merupakan satu-satunya dokumen perencanaan di Desa dan sebagai dasar penyusunan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Perencanaan Pembangunan Desa diselenggarakan dengan mengikutsertakan masyarakat Desa melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan swadaya masyarakat Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/kota berdasarkan penilaian terhadap kebutuhan masyarakat Desa.

Menurut Sjafrizal (2016:15)

perencanaan pembangunan daerah pada dasarnya adalah bersifat multidisipliner karena cakupannya yang luas meliputi aspek geografi, ekonomi, sosial, budaya, politik, pemerintahan, dan fisik. Karena itu, penyusunan perencanaan pembangunan daerah memerlukan suatu tim perencana yang mempunyai beberapa keahlian dalam ilmu terkait seperti Planologi, Teknik, Ekonomi, Pertanian, Hukum, Pemerintahan, dan Sosial Budaya.

Pembangunan Desa dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan masyarakat desa dengan semangat Gotong royong serta memanfaatkan kearifan lokal dan Sumber Daya Alam Desa. Pelaksanaan program sektor yang masuk ke Desa diinformasikan kepada Pemerintah Desa dan diintegrasikan dengan rencana Pembangunan Desa. Masyarakat Desa berhak mendapatkan informasi dan melakukan pemantauan mengenai rencana dan pelaksanaan Pembangunan Desa. Pembangunan kawasan pedesaan dilaksanakan dalam upaya mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat Desa di kawasan pedesaan. Pembangunan kawasan pedesaan meliputi:

- a. Penggunaan dan pemanfaatan wilayah Desa dalam rangka penetapan kawasan pembangunan sesuai dengan tata ruang Kabupaten/Kota;

- b. Pelayanan yang dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat perdesaan;
- c. Pembangunan infrastruktur, peningkatan ekonomi perdesaan, dan pengembangan teknologi tepat guna; dan
- d. Pemberdayaan masyarakat Desa untuk meningkatkan akses terhadap pelayanan dan kegiatan ekonomi.

Ada tiga prinsip pokok pembangunan perdesaan, yaitu:

- 1. Kebijakan dan langkah-langkah pembangunan di setiap desa mengacu kepada pencapaian sasaran pembangunan berdasarkan Trilogi pembangunan. Ketiga unsur Trilogi pembangunan tersebut yaitu:
 - a. Pemerataan pembangunan dan hasil-hasil;
 - b. Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi; dan
 - c. Stabilitas yang sehat dan dinamis, diterapkan di setiap sektor, termasuk desa dan kota, di setiap wilayah secara saling terkait, serta dikembangkan secara selaras dan terpadu.
- 2. Pembangunan desa dilaksanakan dengan prinsip-prinsip pembangunan yang berkelanjutan.
- 3. Meningkatkan efisiensi masyarakat melalui kebijakan deregulasi, debirokrasi dan desentralisasi dengan sebaik-baiknya.

Sesuai dengan Undang-undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa bahwa Pembangunan Desa meliputi tahap perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan.

Pasal 79 mengenai Perencanaan Pembangunan Desa:

1. Pemerintah Desa menyusun perencanaan pembangunan Desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota.
2. Perencanaan pembangunan Desa sebagaimana maksud ayat (1) disusun secara berjangka meliputi:
 - a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun; dan
 - b. Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa, merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
3. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Desa.
4. Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa merupakan satu-satunya dokumen perencanaan di Desa.
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa merupakan pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang diatur dalam Peraturan Pemerintah.
6. Program Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah yang berskala lokal Desa dikoordinasikan dan/atau didelegasikan pelaksanaannya kepada Desa.

7. Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan salah satu sumber masukan dalam perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota. Pasal 80 mengenai Perencanaan Pembangunan Desa:

- 1) Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 79 diselenggarakan dengan mengikutsertakan masyarakat Desa.
- 2) Dalam menyusun Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Desa wajib menyelenggarakan musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa.
- 3) Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, Swadaya masyarakat Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/kota.
- 4) Prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dirumuskan berdasarkan penilaian terhadap kebutuhan masyarakat Desa yang meliputi:
 - a. Peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan dasar;
 - b. Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia;

- c. Pengembangan ekonomi pertanian berskala produktif;
- d. Pengembangan dan pemanfaatan teknologi tepat guna untuk kemajuan ekonomi; dan
- e. Peningkatan kualitas ketertiban dan ketentraman masyarakat Desa berdasarkan kebutuhan masyarakat Desa.

Pasal 81 mengenai Pelaksanaan Pembangunan Desa:

1. Pembangunan Desa dilaksanakan sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah Desa.
2. Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan seluruh masyarakat Desa dengan semangat gotong royong.
3. Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memanfaatkan kearifan lokal dan sumber daya alam Desa.
4. Pembangunan lokal berskala Desa dilaksanakan sendiri oleh Desa. (5) Pembangunan program sektoral yang masuk ke Desa diinformasikan kepada Pemerintah Desa untuk diintegrasikan dengan Pembangunan Desa.

Pasal 81 mengenai Pengawasan Pembangunan Desa:

1. Masyarakat Desa berhak mendapatkan informasi mengenai rencana dan pelaksanaan pembangunan Desa.
2. Masyarakat Desa berhak melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan pembangunan Desa.

3. Masyarakat Desa melaporkan hasil pemantauan dan berbagai keluhan terhadap pelaksanaan pembangunan Desa kepada Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa.
4. Pemerintah Desa wajib menginformasikan perencanaan dan pelaksanaan Pembangunan Jangka Menengah Desa, Rencana Kerja Pemerintah Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa kepada masyarakat Desa melalui layanan informasi kepada umum dan melaporkannya dalam Musyawarah Desa paling sedikit 1(satu) tahun sekali.
5. Masyarakat Desa berpartisipasi dalam Musyawarah Desa untuk menanggapi laporan pelaksanaan Pembangunan Desa.

Jadi, pembangunan desa merupakan pembangunan berbasis perdesaan dengan mengedepankan kearifan lokal kawasan pedesaan dengan bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup masyarakatnya.

2.2.3 Pengertian Pembangunan Infrastruktur

Berdasarkan peraturan presiden no 38/2015 mendefinisikan infrastruktur sebagai salah satu teknis, fisik, sistem yang diperlukan untuk melakukan pelayanan kepada masyarakat serta mendukung jaringan kepada masyarakat dan mendukung jaringan struktur agar pertumbuhan ekonomi dan sosial masyarakat dapat berjalan dengan baik.

The world bank dalam prasetyo dan firdaus (2009) membagi infrastruktur menjadi 3 yaitu :

1. Infrastruktur ekonomi, infrastruktur dalam bentuk nyata atau fisik untuk menunjang aktivitas ekonomi, public utilities berupa tenaga, gas, air, drainase, bendungan serta untuk sektor transportasi berupa jalan, pelabuhan dan sekitarnya.
2. Infrastruktur sosial dapat berupa perumahan, kesehatan dan pendidikan.
3. Infrastruktur administrasi dapat berupa koordinasi dan penegakan hukum.

Sebagai kebutuhan dasar fisik, infrastruktur memerlukan pengorganisasian sistem struktur untuk jaminan ekonomi di sektor publik dan sektor privat sebagai layanan dan fasilitas yang diperlukan berupa infrastruktur fisik dan sosial agar perekonomian dapat berfungsi dengan baik (Wikipedia,2018). Istilah infrastruktur lebih mengarah ke infrastruktur teknis dan fisik yang mendukung jaringan struktur seperti fasilitas jalan, air bersih, listrik, telekomunikasi, pengelolaan limbah dan sarana pendidikan. Selain itu, infrastruktur juga memiliki keterkaitan dalam perkembangan wilayah karena ini ciri dari laju pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Jika suatu daerah memiliki kelengkapan sistem infrastruktur yang baik maka akan memiliki tingkat laju pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat juga akan baik dan sebaliknya.

Seperti adanya jalan yang baik di suatu daerah maka dapat memperlancar transportasi pada saat melewati daerah tersebut. Maka ini disebut infrastruktur yang disediakan pemerintah disebut barang publik. Maka dapat dikatakan barang publik sebenarnya adalah jika seseorang menggunakan barang yang tidak ada persaingan serta orang lain juga dapat menggunakan barang tersebut. Jika kondisi ini sebaliknya, seseorang tidak menahan orang lain menggunakan bersama-sama maka

barang tersebut tetap dianggap sebagai barang publik. Hal ini dapat diartikan bahwa infrastruktur sangat penting mengingat bahwa sebagai tanda pelayanan pemerintah masyarakat.

Selain itu, infrastruktur juga memiliki keterkaitan dalam perkembangan wilayah karena ini ciri dari laju pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Jika suatu daerah memiliki kelengkapan sistem infrastruktur yang lebih baik maka akan memiliki tingkat laju pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat juga akan lebih baik dan sebagainya. Hal ini dapat diartikan bahwa infrastruktur sangatlah penting dalam suatu negara karena infrastruktur merupakan salah satu roda penggerak pertumbuhan ekonomi (Kwik Kian Gie Dalam Chaerunnisa, 2014).

Infrastruktur adalah sebuah sistem fasilitas publik yang bersifat fundamental di tujukan kepada masyarakat/khalayak ramai untuk melayani dan memudahkan masyarakat.

Menurut (Sondang P.Siagian:2005)

Pembangunan infrastruktur merupakan suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang dilakukan secara terencana untuk membangun prasarana atau segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses pembangunan.

Definisi ini mengimplikasikan adanya perbedaan lapisan dari stuktur yang ada, ibaratnya menyediakan support atau layanan (*service*). Dalam dunia fisik, terminologi infrastruktur kadang merujuk kepada keperluan-keperluan publik, seperti air, listrik, gas, pembuangan air, dan layanan telepon. Infrastruktur memiliki beberapa karakteristik tertentu, termasuk:

1. Digunakan bersama-sama (*shared*) oleh pengguna yang lebih luas, ketimbang stuktur-struktur yang didukungnya.
2. Lebih statis dan permanen ketimbang struktur-struktur yang didukungnya.
3. Lebih dipandang sebagai sebuah *service* (*considered a service*), termasuk orang-orang dan proses yang dilibatkan dalam support, lebih dari sekedar sebuah struktur atau perlengkapan (*device*) fisik.
4. Terkadang terhubung secara fisik ke struktur yang didukungnya.
5. Terpisah (*distinct*) dari strktur-struktur yang didukungnya dalam hal kepemilikannya dan orang-orang.

Sedangkan menurut (Kuncoro 2010:20)

Infrastruktur mengacu pada sistem fisik yang menyediakan transportasi, air, bangunan, dan fasilitas publik lain yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia secara ekonomi dan sosial.

Pembangunan fisik adalah pembangunan yang dapat di rasakan langsung oleh Masyarakat atau pembangunan yang tampak oleh mata misalnya berupa Infrastruktur, bangunan, fasilitas umum dan lainnya. Infrastruktur memegang peranan penting sebagai salah satu roda penggerak pertumbuhan ekonomi dan pembangunan. Keberadaan infrastruktur yang memadai sangat diperlukan. Sarana dan prasarana fisik, atau sering disebut dengan infrastruktur merupakan bagian yang sangat penting dalam sistem pelayanan masyarakat. Keberadaan infrastruktur

yang baik memiliki peran yang sangat penting dalam menunjang pemenuhan hak dasar masyarakat seperti pangan, sandang, papan, pendidikan dan kesehatan.

Jadi, dapat dikatakan bahwa infrastruktur merupakan modal yang sangat dibutuhkan masyarakat dalam mendukung kegiatan diberbagai bidang. Pembangunan infrastruktur yang berkualitas akan menciptakan kemakmuran masyarakat. Pembangunan infrastruktur desa diselenggarakan untuk kepentingan masyarakat. Dimana hasil pembangunan tersebut memang benar-benar harus dapat dirasakan oleh masyarakat desa sehingga pada akhirnya dapat berdampak terhadap perbaikan dan peningkatan taraf hidup masyarakat desa, seperti halnya pembangunan infrastruktur di Desa Setu Kulon sangat penting dan dibutuhkan. Dimana pembangunan infrastruktur yang peneliti temukan di lapangan bahwasannya pembangunan infrastruktur di Desa Setu Kulon masih belum optimal sarana dan prasarana infrastrukturnya. Dengan adanya pembangunan infrastruktur Desa dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan Sumber Daya Alam dan lingkungan secara berkelanjutan, sehingga pembangunan dibidang infrastruktur sangat diperlukan.

Dikatakan oleh Badan Penelitian dan Pembangunan Dalam Negeri (dalam Ulyani 2013:19) pembangunan sarana fisik diartikan sebagai alat atau fasilitas yang dapat dirasakan manfaatnya secara langsung oleh masyarakat, pembangunan sarana dan prasarana fisik seperti dimaksud, berupa:

1. Pembangunan infrastruktur transportasi perdesaan guna mendukung peningkatan aksesibilitas masyarakat desa, yaitu: jalan, jembatan, tambatan perahu;
2. Pembangunan infrastruktur yang mendukung produksi pertanian, yaitu: irigasi perdesaan;
3. Pembangunan infrastruktur yang mendukung pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, meliputi: penyediaan air minum, sanitasi perdesaan.

2.3 Konsep Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan

2.3.1 Konsep Perencanaan

Perencanaan merupakan keputusan untuk waktu yang akan datang mengenai apa yang akan dilakukan? Bilamana akan dilakukan? Dan siapa yang akan melakukan? Perencanaan pembangunan merupakan tugas pokok dalam administrasi atau manajemen pembangunan. Perencanaan diperlukan karena kebutuhan pembangunan lebih besar daripada sumber daya yang tersedia, sehingga dalam proses pelaksanaan pembangunan nasional bisa mencapai tujuan pembangunan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya. Melalui perencanaan ingin dirumuskan kegiatan pembangunan secara efektif dan efisien yang dapat memberikan hasil optimal dalam memanfaatkan sumber daya yang tersedia dan mengembangkan potensi yang ada.

Pada dasarnya perencanaan sebagai salah satu fungsi manajemen adalah proses pengambilan keputusan dari sejumlah pilihan, untuk mencapai suatu tujuan yang dikehendaki. Perencanaan pembangunan pada umumnya harus memiliki,

mengetahui, dan memperhitungkan beberapa unsur pokok, yaitu: tujuan akhir yang ingin dicapai, sasaran-sasaran dan prioritas untuk merealisasikan tujuan akhir, jangka waktu yang diperlukan dalam mencapai sasaran-sasaran tersebut, masalah-masalah yang dihadapi, modal atau sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya, kebijaksanaan-kebijaksanaan untuk merealisasikannya, orang/organisasi atau badan pelaksanaannya.

Menurut Nickels, McHugh and McHugh (dalam Tisnawati Sule dan Saefullah 2010:8) menyebutkan bahwa :

fungsi manajemen terdiri dari empat fungsi adalah perencanaan (*Planing*), pengorganisasian (*Organizing*), pengarahan (*Directing*), dan pengawasan (*Controlling*).

Fungsi perencanaan yaitu perencanaan (*planing*) sering kali merupakan pokok dasar tercapainya suatu tujuan. Dalam membuat suatu rencana ini, haruslah diberikan kepada pihak yang lebih mengetahui konsep tujuan yang akan dicapai. Di daerah pedesaan dan kelurahan dalam pembuatan dan pelaksanaan sebuah program kerja dalam bidang pembangunan, maka dalam hal pembuatan perencanaan pembangunan desa dan kelurahan akan diserahkan pada sebuah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat desa yang memiliki *statement* dari masyarakat, oleh masyarakat, dan untuk masyarakat.

Menurut (Riyadi dan Deddy Supriady, 2004:7)

Perencanaan pembangunan dapat diartikan sebagai suatu proses perumusan alternatif-alternatif atau keputusan-keputusan yang didasarkan pada data-data dan fakta-fakta yang akan digunakan sebagai bahan untuk melaksanakan suatu rangkaian kegiatan atau aktivitas kemasyarakatan, baik yang bersifat fisik (material) maupun non fisik (mental dan spiritual), dalam rangka mencapai tujuan yang lebih baik.

2.3.2 Pelaksanaan pembangunan

Pelaksanaan sebagai usaha-usaha yang dilakukan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan melengkapi segala kebutuhan alat-alat yang diperlukan, siapa yang akan melaksanakannya, dimana tempat pelaksanaannya dan kapan waktu dimulainya. Siagian S.P mengemukakan bahwa pelaksanaan merupakan keseluruhan proses pemberian motivasi bekerja kepada para bawahan sedemikian rupa, sehingga pada akhirnya mereka mau bekerja secara ikhlas agar tercapai tujuan organisasi.

2.4 Faktor yang Mempengaruhi Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur

Berbicara tentang pembangunan desa, selama ini sebagian diantara kita terlalu terpaku pada pembangunan berskala besar (atau proyek pembangunan) di wilayah pedesaan. Padahal pembangunan desa yang sesungguhnya tidaklah terbatas pada pembangunan berskala "*proyek*" saja, akan tetapi pembangunan dalam lingkup atau cakupan yang lebih luas. Pembangunan yang berlangsung di desa dapat saja berupa berbagai proses pembangunan yang dilakukan di wilayah desa dengan menggunakan sebagian atau seluruh sumber daya (biaya, material, sumber daya manusia) bersumber dari pemerintah (pusat atau daerah), selain itu dapat pula berupa sebagian atau seluruh sumber daya pembangunan bersumber dari desa. Sesungguhnya, ada atau tidak ada bantuan pemerintah terhadap desa, denyut nadi kehidupan dan proses pembangunan di desa tetap berjalan. Masyarakat desa memiliki kemandirian yang cukup tinggi dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, mengembangkan potensi diri dan keluarganya serta membangun sarana dan prasarana di desa. Namun demikian, tanpa perhatian dan bantuan serta stimulan dari

pihak-pihak luar desa dan pemerintah proses pembangunan di desa berjalan dalam kecepatan yang relatif rendah. Kondisi ini yang menyebabkan pembangunan di desa terkesan lamban dan cenderung terbelakang.

Jika melihat fenomena pembangunan masyarakat desa pada masa lalu, terutama di era orde baru, pembangunan desa merupakan cara dan pendekatan pembangunan yang diprogramkan negara secara sentralistik. Dimana pembangunan desa dilakukan oleh pemerintah baik dengan kemampuan sendiri (dalam negeri) maupun dengan dukungan negara-negara maju dan organisasi-organisasi internasional. Pembangunan desa pada era orde baru dikenal dengan sebutan Pembangunan Masyarakat Desa (PMD), dan Pembangunan Desa (Bangdes). Kemudian di era reformasi peristilahan terkait pembangunan desa lebih menonjol "*Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD)*". Dibalik semua itu, persoalan peristilahan tidaklah penting, yang terpenting adalah substansinya terkait pembangunan desa. Pada dasarnya tujuan dari suatu Negara melaksanakan pembangunan adalah untuk mengatasi atau keluar dari masalah-masalah yang selama ini dihadapi. Dalam melakukan pembangunan antara Negara yang satu dengan Negara yang lainnya tidak mungkin akan sama. Menurut Zafar Iqbal dan Areef Suleman (2010:17-19) ada beberapa faktor yang menjadi kendala dalam pembangunan infrastruktur antara lain:

Kualitas sumber daya manusia

Faktor yang mempengaruhi pembangunan yang pertama yaitu kualitas sumber daya manusia. Manusia merupakan faktor produksi yang sangat penting dalam pembangunan karena manusia mempunyai peranan dalam menciptakan

teknologi baru selain mengembangkan teknologi yang sudah ada, serta mengorganisasikan faktor-faktor produksi lainnya. Masalah sumber daya manusia atau dikenal dengan masalah kependudukan banyak berpengaruh kepada hasil pembangunan. Penduduk yang besar dengan luas wilayah yang besar bisa menjadi daya dukung dalam proses pembangunan. Penduduk dengan kualitas sumber daya yang tinggi maka akan mempercepat capaian pembangunan. Namun sebaliknya jika penduduk yang besar dengan kualitas yang rendah maka akan menjadi penghambat proses pembangunan. Sumber Daya Manusia yang menyangkut kemampuan, baik kemampuan fisik, maupun non fisik. Untuk kepentingan akselerasi suatu pembangunan di bidang apapun, peningkatan kualitas sumber daya manusia merupakan salah satu syarat utama. Oleh sebab itu untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dapat dilakukan melalui pendidikan, yaitu dengan memberikan pelatihan atau training, memberikan insentive atau bonus dan mengaplikasikan atau menerapkan teknologi yang dapat membantu meningkatkan efisiensi dan efektifitas kerja. Kualitas sumber daya manusia merupakan merupakan komponen penting dalam setiap gerak pembangunan. Hanya dari sumber daya manusia yang berkualitas tinggilah yang dapat mempercepat pembangunan bangsa. Jumlah penduduk yang besar, apabila tidak diikuti dengan kualitas yang memadai, hanyalah akan menjadi beban pembangunan. Kualitas penduduk adalah keadaan penduduk baik secara perorangan maupun kelompok berdasarkan tingkat kemajuan yang telah dicapai. Manusia yang berkualitas adalah SDM yang komprehensif dalam berfikir dan selalu mengantisipasi tuntutan di masa depan, memiliki sikap positif, berperilaku terpuji, dan berwawasan serta memiliki

kemampuan, keterampilan dan keahlian yang sesuai dengan kebutuhan diberbagai bidang sektor pembangunan.

Sumber Daya Manusia yang berkualitas dapat meningkatkan produktivitas dalam bekerja sehingga tujuan organisasi dapat dengan mudah untuk tercapai. Pembangunan kualitas sumber daya manusia merupakan pokok utama dalam pembangunan dan pertumbuhan masa depan ekonomi Indonesia. Sudah jelas terlihat dari penelitian ini bahwa banyak kendala berhubungan erat dengan masalah pokok tersebut diatas. Sayangnya, tidak ada cara cepat untuk menanggulangi masalah ini. Dalam jangka pendek, beberapa kegiatan misalnya: identifikasi proyek, dan studi prakelayakan harus dilakukan oleh ahli yang diambil dari luar (pemerintahan). Mitra pembangunan dapat memegang peranan penting dalam pembentukan kapasitas (*capacity building*) dengan cara mengembangkan serta membiayai program transfer pengetahuan dan keahlian. Mereka harus memusatkan perhatian pada keahlian-keahlian yang berorientasi pada proses dan pengetahuan (*software*), dan mengembangkan keahlian para petugas yang bersangkutan agar dapat memahami bagaimana menggunakan pengetahuan dan keahlian baru tersebut dalam menangani kendalakendala utama di dalam investasi infrastruktur. Sumber daya manusia yang berkualitas yaitu yang memiliki wawasan serta memiliki kemampuan, keterampilan dan keahlian yang sesuai dengan kebutuhan diberbagai bidang sektor pembangunan. Sumber daya manusia yang berkualitas dapat dilihat dari tingkat pendidikan dan kemampuan yang dimiliki. Dalam hal ketersediaan sumber daya manusia terdapat dua poin penting dalam masalah kualitas sumber daya manusia, yaitu:

a. Kualitas Pendidikan

Pendidikan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan manusia karena pendidikan merupakan suatu usaha untuk menguatkan kualitas manusia yang berlangsung seumur hidup dengan berpedoman pada pendidikan maka manusia akan dapat maju dan berkembang untuk mencapai kesempurnaan. Pendidikan dapat dikatakan bermutu atau berkualitas jika sudah memenuhi standar artinya produk tersebut harus tepat sesuai dengan tujuan. Pendidikan mempunyai peran penting, karena pendidikan mampu meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas, dan pendidikan merupakan salah satu bentuk investasi modal manusia yang akan menentukan kualitas sumber daya manusia suatu bangsa. Seperti pada Negara-negara yang maju umumnya kualitas pendidikan yang baik sehingga menghasilkan SDM yang berkualitas. Pendidikan yang baik dapat menghasilkan SDM yang baik. Jadi betapa pentingnya pendidikan untuk menghasilkan sumber daya yang berkualitas dan memiliki daya saing. Kualitas pendidikan disini dapat dilihat dari seberapa tinggi jenjang pendidikan yang dimiliki seseorang karena:

- 1) Pendidikan yang lebih tinggi akan memperluas pengetahuan masyarakat dan mempertinggi rasionalitas pemikiran mereka. Hal ini memungkinkan masyarakat mengambil

langkah yang lebih rasional dalam bertindak atau mengambil keputusan.

- 2) Pengetahuan yang lebih baik yang diperoleh dari pendidikan menjadi perangsang untuk menciptakan pembaharuan-pembaharuan dalam bidang teknik, ekonomi dan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat lainnya.

b. Kemampuan

Kemampuan seseorang bisa diukur dari tingkat keterampilan dan pengetahuan yang dimiliki dalam melaksanakan tugas yang dibebankan. Dengan keterampilan yang ada maka pegawai akan berusaha meningkatkan kualitas hasil kerjanya. Dalam penelitian yang peneliti lakukan maksud dari kemampuan disini yaitu kemampuan yang dimiliki oleh aparat desa serta pelaksana dari program pembangunan infrastruktur. Kemampuan yang dimiliki oleh aparat dalam bekerja dengan kelompok kerja, yakni baik dalam bekerja sama dengan sesama anggota organisasi atau instansi. Misalnya kemampuan berkomunikasi mengeluarkan ide, pendapat bahkan saran dari orang lain dapat menjadi faktor keberhasilan melaksanakan tugas yang baik. sehingga pembangunan infrastruktur dapat berjalan dengan lancar. Dan kemampuan dalam mengembangkan keahlian para petugas yang bersangkutan agar dapat memahami bagaimana menggunakan pengetahuan dan keahlian baru tersebut dalam menangani kendala-kendala utama di

dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur. Sumber daya manusia harus dikelola agar memiliki keterampilan dan kemampuan yang dibutuhkan dimasa yang akan mendatang, yang memungkinkannya untuk mewujudkan kesejahteraan hidup material yang layak secara manusiawi. Dengan memiliki keterampilan atau kemampuan tersebut, manusia akan terhindar dari kehidupan yang bersifat konsumtif, karena merupakan sumber daya manusia yang produktif. Kurangnya keterampilan dan kemampuan operasional yang terbatas pada pemerintah daerah telah menyebabkan tertundanya pelaksanaan proyek. Khususnya, keterbatasan kapasitas terlihat lebih nyata di bidang perancangan proyek dan pengembangan, yang mengakibatkan penundaan pelaksanaan.

